

Nama: Arshellah Cahya Yuniarti

NPM: 2413031058

Kelas: B

1. Analisis perilaku manajemen PT Lestari Mineral dalam memilih kebijakan konservatif:

- **Motivasi perilaku:**

Pendekatan konservatif dipilih karena manajemen cenderung berhati-hati (prudence) dalam menghadapi ketidakpastian terkait biaya reklamasi dan tanggung jawab lingkungan. Dengan mengakui biaya lebih awal dan melakukan estimasi secara hati-hati, perusahaan dapat meminimalkan risiko kekurangan cadangan dana serta menghindari potensi sanksi atau masalah regulasi di masa depan. Selain itu, konservatisme digunakan sebagai strategi untuk menjaga reputasi dan memperkuat izin operasional (license to operate), terutama di industri tambang yang sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial. Jika manajemen memiliki insentif jangka panjang, seperti kompensasi berbasis keberlanjutan, mereka cenderung memilih kebijakan yang mencerminkan tanggung jawab lingkungan. Dalam kondisi ketidakpastian akuntansi yang tinggi dan keterbatasan data, pendekatan konservatif juga membantu mengurangi kemungkinan revisi besar terhadap laporan keuangan di kemudian hari.

- **Dampak terhadap stakeholders:**

Bagi investor domestik dan publik, pendekatan ini dapat meningkatkan kepercayaan jangka panjang meskipun laba yang lebih rendah mungkin mengecewakan pihak yang berorientasi jangka pendek. Sementara itu, investor asing yang menginginkan laba lebih tinggi bisa memberikan tekanan agar perusahaan mengubah kebijakan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dari sisi pemerintah dan masyarakat lokal, kebijakan konservatif memberi dampak positif karena menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan transparansi lingkungan. Bagi karyawan dan pemasok, strategi ini menjaga keberlanjutan operasi jangka panjang perusahaan. Di pasar modal, laporan keuangan yang konservatif membantu menstabilkan laba dan mengurangi fluktuasi, meskipun mungkin terlihat kurang menarik bagi investor yang mencari keuntungan cepat.

2. Sikap akuntan perusahaan menghadapi tekanan investor luar negeri dan aspek etik:

Manakala menghadapi tekanan dari investor luar negeri, akuntan perusahaan perlu menegakkan tanggung jawab professional dengan memastikan seluruh kebijakan akuntansi tetap sejalan dengan standar dan prinsip yang berlaku, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Setiap keputusan harus didukung oleh analisis teknis yang memadai serta dokumentasi yang menjelaskan dasar professional dalam memilih pendekatan konservatif.

Komunikasi terbuka menjadi penting, akuntan perlu menjelaskan kepada investor mengenai implikasi dari setiap alternatif kebijakan, baik dari sisi laba, volatilitas, risiko regulasi, maupun reputasi perusahaan, termasuk dengan menyediakan analisis scenario dan informasi non-keuangan yang relevan. Untuk memperkuat legitimasi, akuntan dapat melibatkan komite audit dan auditor eksternal sebagai pihak independent. Selain itu, solusi kompromi yang sah, seperti penambahan pengungkapan atau rekonsiliasi laporan, dapat dilakukan selama tetap transparan dan tidak menyalahi standar.

Apabila tekanan investor mendorong perubahan yang menyalahi prinsip akuntansi atau menyajikan informasi yang menyesatkan, Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan etika profesi. Kode etik akuntan (misalnya IESBA/IFAC) menuntut integritas, objektivitas, kompetensi professional, kehati-hatian, serta perilaku professional. Namun, perubahan kebijakan dapat diterima bila memenuhi tiga syarat Utama: sesuai dengan standar yang berlaku, didukung analisis teknis yang rasional, dan diungkapkan secara transparan.

Secara keseluruhan, akuntan wajib menolak tekanan yang berpotensi merusak keandalan laporan keuangan, tetapi tetap dapat mencari alternatif yang sah dan menjelaskan konsekuensinya secara terbuka kepada investor.

3. Bagaimana proses penetapan standar dipengaruhi oleh ekonomi politik dan contoh kasus ini di nyata:

Mekanisme pengaruh ekonomi-politik:

- Lobbying / pressure groups: Industri, asosiasi, dan perusahaan besar memberi masukan teknis sekaligus tekanan politik untuk mengarahkan hasil standard-setting sesuai kepentingan ekonomi mereka.

- Regulator & pembuat kebijakan nasional: Pemerintah menilai implikasi kebijakan akuntansi terhadap kepentingan publik (pajak, lingkungan, stabilitas), sehingga proses sering bersifat kompromistis.
- Kekuatan ekonomi & sumber daya: Negara/perusahaan dengan sumber daya teknis dan ekonomis besar memiliki pengaruh lebih besar dalam diskusi internasional (mis. IASB), sehingga standar global cenderung merefleksikan kepentingan mereka.
- Norm shifting melalui agenda politik: Isu-isu seperti keberlanjutan, climate reporting, atau hak-aspek sosial dapat diangkat oleh aktor politik sehingga mempengaruhi arah dan prioritas standard-setting.

Contoh dari kasus PT Lestari Mineral:

- Di tingkat nasional, asosiasi industri tambang memberi tekanan supaya standar lokal lebih “ramah” terhadap praktik sektor (mis. pengakuan biaya reklamasi lebih fleksibel) agar tidak membebani industri. Pemerintah yang ingin menarik investasi juga mungkin mendorong kebijakan yang lebih lunak.
- Di tingkat global, investor luar negeri yang ingin laporan lebih “komparable” atau laba lebih tinggi dapat mendorong interpretasi IFRS yang lebih agresif; perusahaan multinasional dan auditor besar turut membentuk interpretasi tersebut melalui forum internasional.

4. Bandingkan standard-setting berbasis prinsip (IFRS) vs berbasis aturan (GAAP) dan relevansi untuk Indonesia:

Perbedaan Utama:

Prinsip (IFRS, principle-based):

- Menekankan prinsip umum (ekonomi substansi, relevansi, faithful representation). Memerlukan pertimbangan profesional dan judgment; lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan konteks berbeda.
- Keuntungan: adaptif untuk transaksi baru, mendukung transparansi esensial.
- Tantangan: membutuhkan kemampuan penegakan kuat dan profesional yang terlatih.

Aturan (rule-based, mis. beberapa elemen US GAAP):

- Memberikan aturan spesifik dan preskriptif untuk berbagai situasi.
- Keuntungan: konsistensi dan kepastian aplikasi (kurangi perbedaan interpretasi).

- Tantangan: kompleksitas tinggi, rentan arbitrage (cari celah aturan), kurang fleksibel untuk kasus baru.

Dalam konteks Indonesia, mana lebih relevan? Pendekatan campuran / prinsip-based dengan guidance implementasi cenderung paling sesuai untuk Indonesia.

- Alasan: Kebutuhan fleksibilitas: Sektor seperti sumber daya alam dan keberlanjutan memerlukan prinsip yang dapat mengakomodasi realitas lokal dan transaksi kompleks.
- Perbedaan ukuran entitas: Indonesia punya banyak perusahaan kecil/menengah yang butuh kepastian; guidance dan safe-harbors (aturan pelengkap) membantu mereka menerapkan prinsip.
- Kapasitas penegakan & profesional: Prinsip memerlukan auditor, regulator, dan preparer yang kuat; saat kapasitas ini masih berkembang, perlu disertai pedoman teknis, contoh aplikasi, dan pelatihan.
- Kepentingan investasi internasional: Prinsip-based (IFRS) lebih ramah investor global, tapi harus ditunjang enforcement agar percaya.